PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEPUTUSAN DPR DALAM PENGUJIAN PERPU

Oleh: Ali Marwan Hsb*

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas) (setkab.go.id).

Keluarnya Perppu Ormas tersebut mendapatkan pro dan kontra. Sehingga ada beberapa pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat ada 7 (tujuh) permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 diajukan oleh Afriady Putra;
2. Permohonan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto;
3. Permohonan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara;
4. Permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni;
5. Permohonan nomor perkara 49/PUU-XV/2017 diajukan oleh Persatuan Islam;
6. Permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Front Pembela Islam Munarman bersama empat Organisasi Keagamaan yakni Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia; dan
7. Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat

YUDISIAL REVIEW

Cinta Tanah Air, yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Perppu Ormas dibahas dan diputuskan apakah disetujui atau tidak untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, ada 2 (dua) lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menguji perppu ormas tersebut yaitu MK dan DPR.

Proses Pengujian di MK

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengujian perppu menjadi kewenangan MK dimulai setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan bahwa perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru; (b) hubungan hukum baru dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum

yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi undang-undang.

Putusan MK berkaitan dengan pengujian Perppu pada dasarnya ada 3 (tiga) yaitu tidak dapat diterima, ditolak atau diterima. Putusan tidak dapat diterima dikeluarkan jika pemohon tidak mempunyai legal standing, putusan ditolak jika perppu yang dimohonkan dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan diterima jika perppu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum dari jenis putusan ini yaitu apabila dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak, maka perppu yang diajukan tetap berlaku sedangkan jika dinyatakan diterima, maka Pasal, ayat atau bahkan keseluruhan perppu dinyatakan tidak berlaku.

Proses di DPR

Ketentuan mengenai proses penetapan perppu menjadi undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

YUDICIAL REVIEW

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;

- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR hanya berwenang untuk menyatakan setuju atau tidak setuju perppu yang dikeluarkan ditetapkan sebagai undang-undang. Jika DPR setuju, maka pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang penetapan perppu sebagai undang-undang. Apabila DPR tidak setuju, maka pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan perppu.

Antara Putusan MK dan Keputusan DPR

Keberadaan kedua lembaga tersebut tentunya harus dihormati, karena sama-sama lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam UUD 1945. Akan tetapi, kewenangan ini akan saling timpang tindih apabila kemudian perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah bersamaan diuji di MK dan dibahas di DPR seperti yang terjadi terhadap perppu Ormas. Sehingga kedua lembaga seolah-olah harus berlomba mengeluarkan keputusan terlebih dahulu. Karena keputusan dari kedua lembaga tersebut akan saling mempengaruhi.

Apabila MK terlebih dahulu mengeluarkan putusan, maka akan berpengaruh juga terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh DPR. Jika MK menyatakan menerima permohonan dan menyatakan perppu bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perppu tersebut dinyatakan tidak berlaku, maka keputusan DPR menjadi tidak berarti lagi karena perppu yang dibahas DPR sudah tidak berlaku lagi. Sebaliknya jika keputusan DPR keluar terlebih dahulu dibandingkan putusan MK juga berpengaruh terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh MK. Apabila kemudian DPR menyatakan menerima perppu untuk ditetapkan menjadi undang-undang, maka perkara yang sedang diperiksa di MK harus dihentikan karena permohonan yang diajukan sudah kehilangan objek perkara karena objek perkara sudah menjadi undang-undang dan harus diajukan permohonan yang baru terhadap pengesahan perppu sebagai undang-undang.

Pengaturan ke Depan

Pengaturan mengenai hal ini memang tidak ada ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, bagaimana penyelesaian apabila perppu yang sedang menjadi objek perkara di MK diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas. Sehingga, seperti yang terjadi sekarang baik perkara di MK dan di DPR sama-sama berjalan. Karena memang ketika MK dibentuk yang menjadi kewenangan MK adalah menguji undang-undang

YUDISIAL REVIEW

terhadap undang-undang dasar, tidak termasuk menguji perppu. Sehingga hal seperti ini tidak dapat diantisipasi.

Benturan yang terjadi antar lembaga negara yaitu MK dan Mahkamah Agung bisa diantisipasi karena adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Pengujian Peraturan perundang-undang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung, wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Pasal 55 ini, seyogianya bisa juga diterapkan terhadap pengujian perppu agar tidak ada benturan antara putusan MK dan keputusan DPR yang kemungkinan besar dapat bertentangan satu sama lain.

Ke depan bisa dibuat ketentuan bahwa apabila suatu perppu sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka proses pembahasan perppu di DPR dihentikan sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Sehingga, apabila MK sudah memutuskan bahwa suatu perppu bertentangan dengan UUD 1945, maka DPR tidak perlu lagi membahas apakah perppu tersebut disetujui atau tidak menjadi undang-undang.

***Staf Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)**